

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSADIAN
KABUPATEN BUTON

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton pada tahun 2025 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan disektor Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun tingkat Provinsi dan tingkat Pusat.

Sejalan dengan review internal terhadap tujuan, sasaran dan indicator sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Rencana Strategis Periode 2025-2029 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Buton. Rencana Strategis 2025-2029 ini merupakan proses pembangunan 5 (lima) tahun yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada :

1. RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton terdahulu
3. Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton tahun 2025-2029 ini menjadikan arah dan proses pembangunan Kabupaten Buton yang lebih terarah.

Pasarwajo, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Buton,



H. SUHARDIN SANUSI S.T., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19750731 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON	
2.1. Gambaran Umum Pelayanan	7
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	10
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	14
2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	15
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	18
3.1.1 Tujuan	20
3.1.2 Sasaran	23
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	25
3.2.1 Strategi	25
3.2.2 Arah Kebijakan.....	26
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	29
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	31
 BAB VII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Kepangkatan	9
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Pendidikan.....	9
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Jabatan/Eselon	9
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
Tabel 2.5	Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	17
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	24
Tabel 3.2	Penapan Renstra	25
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra	27
Tabel 4.1	Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra	33
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	39
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	47
Tabel 4.4	Indakator Kinerja Utama.....	48
Tabel 4.5	Indakator Kinerja Kunci	49
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah	51

DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi	8
Konsep Renstra SKPD.....	18
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Resntra PD	19
Kerangka Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana pembangunan jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Mengacu Inmedagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra Bappeda Kabupaten Buton berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Bappeda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Bappeda telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persan Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika (Berinta Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
24. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi dan penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 sesuai urusan, tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sehingga program/kegiatan dan penganggaran yang ditetapkan adalah yang paling sesuai dengan prioritas kebutuhan.

2. Sebagai penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Kominfo di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik akan selalu melibatkan peran stakeholders dalam implementasinya.
3. Sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana pembangunan (Renstra dan Renja), melalui laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2025- 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan Sistematikan penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi), Sumber daya , kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM) dan kelompok sasaran layanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton serta permasalahan pelayanan dan isu strategis yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Uraian Program , uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, dimana uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Buton serta target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.1 Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton, yaitu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian di Kabupaten Buton.

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Komunikasi Informatika dan urusan bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

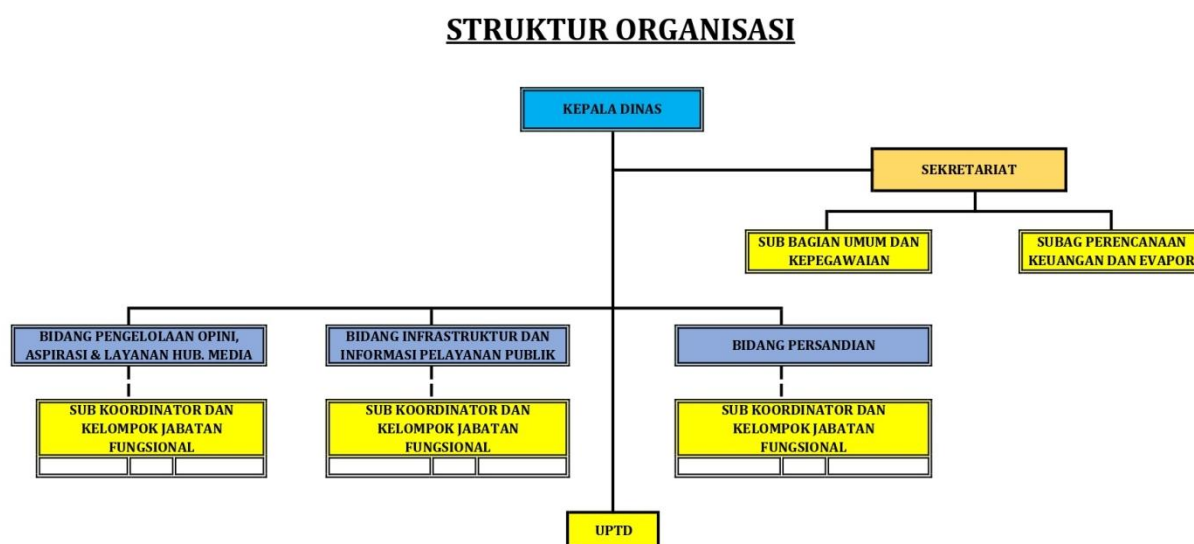
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah Tipe B. Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Evapor
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi & Layanan Hubungan Media, terdiri dari Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
- d. Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik, terdiri dari Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
- e. Bidang Persandian, terdiri dari Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :



2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sampai dengan tahun 2025 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan perincian 23 (Dua puluh tiga) orang tenaga organik PNS dan 16 (enam belas) orang tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut 3 (tiga) orang berpendidikan pascasarjana (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 5 (enam) orang berpendidikan Diploma dan sisanya 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA/ sederajat. Komposisi tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan menjadi salah satu modal dasar bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV/b	2 orang
2	Golongan IV/a	3 orang
3	Golongan III/d	4 orang
4	Golongan III/c	1 orang
5	Golongan III/b	6 orang
6	Golongan III/a	4 orang
7	Golongan II/d	1 Orang
8	Golongan II/c	2 orang
9	PTT	16 orang
Total		39 orang

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	3 orang
2	Sarjana	23 orang
3	Diploma	5 orang
4	SLTA/Sederajat	8 orang
Total		39 orang

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	3 orang
4	Eselon IV.a	2 orang
5	Staf Fungsional Ahli Muda	3 orang
6	Staf Fungsional Umum	13 orang
7	PTT	16 orang
Total		39 orang

a. Sarana Pasarana dan Fasilitas Yang Tersedia

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Saat ini jumlah perlengkapan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Buton

masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	
2.	Kendaraan Roda Dua	7 Unit	
3.	Komputer PC	7 Unit	
4.	Laptop	20 Unit	
5.	Printer	15 Unit	
6.	Kamera Video	5 Unit	
7.	Kamera Foto	5 Unit	
8.	Kamera Zoom	3 Unit	
9.	Videotrone	1 Unit	
10.	Televisi	5 Unit	
11.	Mesin Fax	2 Unit	
12.	Meja	20 Unit	
13.	Kursi	35 Unit	
14.	Lemari Kayu	6 Unit	
15.	Lemari Besi	3 Unit	
16.	Filling Kabinet	2 Unit	
17.	Mesin Ketik	1 Unit	
18.	Kipas angin	1 Unit	
19.	AC	10 Unit	
20.	Papan Media Informasi Manual	11 Buah	
21.	Radio SSB	8 Unit	
22.	Brankas	1 Unit	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dalam kapasitasnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik yang memiliki target sasaran dan program untuk mendukung kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada beberapa indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,

dimana indikator-indikator sasaran tersebut dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton pada periode renstra sebelumnya menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik. Selain itu, pada pencapaian indikator Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga dapat mencapai target yang telah ditentukan yang dapat terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Presentase kepuasan pelayanan kepada Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LAKIP perangkat daerah			64,55%	64,58%	70,35%	64,55%	64,58%	64,58	100%	100%	100%
3	Persentase Aduan Masyarakat			80%	85,71%	95%	76,92%	76,92%	66,67%	96,15%	89,75%	70,18%
4	Rasio OPD dan Kecamatan yang akses jaringan internet			66,67%	77,78%	100%	57,78%	75,56%	77,79%	86,67%	97,15%	77,79%
5	Jumlah muatan berita / Informasi yang terpublikasikan			80 Berita	85 Berita	90 Berita	1535 Berita	1.256 Berita	1.679 Berita	1.918,7%	1.477.65%	1865,56%
6	Media Masa (cetak & elektronik) dalam publikasi daerah			35 Media	40 Media	45 Media	26 Media	30 Media	29 Media	74,29%	75%	64,44%
7	Web site milik pemerintah daerah			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%
8	Persentase OPD yang memiliki Website resmi			26,32%	31,58%	39,47%	36,84%	50%	55,26%	140%	158,33%	140,01%
9	Persentase ketersediaan Jaringan Telekomunikasi			81,82%	90,91%	100%	67,27%	70,91%	78,18%	82,22%	78%	78,18%
10	Capaian Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan			42,86%	71,43%	100%	-					
11	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			19,45%	21,61%	25,93%	-					
12	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon			50%	60%	70%	-					
13	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			13,16%	15,79%	18,42%	10,53%	10,53%	10,53%	80,02%	66,67%	66,67 %
14	Persentase pegawai yang telah mendapatkan sertifikat sandi			100%	100%	100%	50%	66,67	71,43			
15	Jumlah sarana dan prasarana pendukung persandian			2 Unit	4 Unit	12 Unit	3 Unit	5 Unit	1 Unit			

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			NA	NA	NA	26,67 %	37,78 %	NA	15,56 %	20%	15,56 %	17,78 %					
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			NA	NA	NA	33,33 %	44,44 %	NA	50%	46,67 %	24,44 %	24,44 %					
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			NA	NA	NA	75,71 %	79,90 %	NA	72,88 %	84,68 %	84,69 %	79,83					
4	Presentasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah			NA	NA	NA	55,56 %	62,22 %	NA	NA	NA	60%	60%					
5	Presentasi OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah			NA	NA	NA	55,56 %	62,22 %	NA	NA	NA	60%	60%					
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah			NA	NA	NA	33,33 %	50%	NA	NA	NA	22,22 %	22,22 %					

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok individu atau kelompok yang mendapatkan manfaat langsung dari sebuah layanan atau program. Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bertujuan untuk mendukung perkembangan infrastruktur dan literasi digital di Indonesia, serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengawasan kelompok informasi masyarakat, keamanan data dan informasi, hingga pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi. Berikut ini Sasaran-sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian:

1. **Layanan Pengaduan Masyarakat:** menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten negatif, hoaks, atau pelanggaran terkait penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia maya.
2. **Pelayanan Keamanan Siber:** memberikan layanan terkait dengan keamanan siber, seperti sosialisasi dan edukasi mengenai cara melindungi diri dari ancaman dunia maya, penanganan insiden keamanan siber, serta dukungan terhadap upaya pemulihan setelah serangan siber.
3. **Pelayanan Informasi dan Literasi Digital:** mengadakan program pelatihan dan webinar untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini termasuk edukasi terkait penggunaan teknologi secara bijak dan aman, serta bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup.
4. **Pelayanan Infrastruktur Teknologi:** memberikan dukungan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di wilayah Kabupaten Buton, baik dalam bentuk pembangunan jaringan internet, penyediaan layanan komunikasi, maupun pengembangan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. **Regulasi dan Pengawasan Media Sosial:** menyediakan layanan terkait dengan pengawasan konten di media sosial, termasuk penanganan konten negatif, ujaran kebencian, serta pembatasan terhadap konten yang melanggar undang-undang.
6. **Layanan Pengembangan Ekonomi Digital:** berperan dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi digital, termasuk mendukung sektor bisnis digital,

perdagangan elektronik, serta meningkatkan kualitas dan akses internet untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis digital.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Hubungan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah KLHS menjadi dasar penting untuk menyusun RPJMD yang berkelanjutan. KLHS digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan dan potensi dampak pembangunan, sehingga RPJMD dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. KLHS membantu mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD, memastikan pembangunan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

Berbagai isu strategis yang teridentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Buton mencerminkan tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan seperti belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi public, merupakan permasalahan yang perlu dihadapi dan diatasi dengan baik. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki peluang besar dalam Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan bidang teknologi dan informasi. Dengan tersedianya beberapa titik jaringan intra OPD ini menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat meningkatkan tata kelola data terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Di samping itu, seluruh elemen masyarakat dapat menggunakan data yang resmi dan akurat dari pemerintah. Beberapa masalah yang sangat penting dalam pengelolaan satu data indonesia di Kabupaten Buton adalah belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia. Penyusunan daftar data dan metadata statistik sectoral merupakan salah satu Standarisasi data Pemerintah sehingga menghasilkan data yang strategis, akurat dan berkualitas. Ada korelasi yang tegas antara kemampuan tumbuh suatu negara dengan ketersediaan data yang berkualitas.

Beralihnya tata kelola pemerintah menuju era digital, berpotensi menimbulkan ancaman Kualitas keamanan informasi dan data. Karenanya, perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap keseluruhan sistem berbasis teknologi informasi. Kualitas

keamanan informasi dan data adalah kemampuan system dan organisasi dalam melindungi informasi dari berbagai ancaman sehingga informasi tersebut tetap rahasia, utuh dan tersedia setiap saat. Upaya ini menjawab tantangan terkait Belum optimalnya jaringan keamanan data dan informasi pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk itu, optimalisasi PAD menjadi tantangan strategis bagi setiap pemerintah daerah. Salah satu sumber PAD yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Retribusi Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron. Dalam pengelolaan sumber PAD tersebut masih terdapat berbagai hambatan diantaranya kondisi papan media reklame kurang layak, minimnya papan media reklame dan belum maksimalnya sosialisasi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika melakukan langkah-langkah strategis yaitu memaksimalkan promosi dan sosialisasi, melakukan kerjasama dengan pihak objek retribusi dan penambahan papan media reklame pada titik lokasi strategis.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah isu atau masalah yang memiliki dampak signifikan dan penting untuk ditangani karena berpotensi menjadi tantangan atau peluang besar bagi sebuah organisasi atau daerah di masa depan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton di sajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

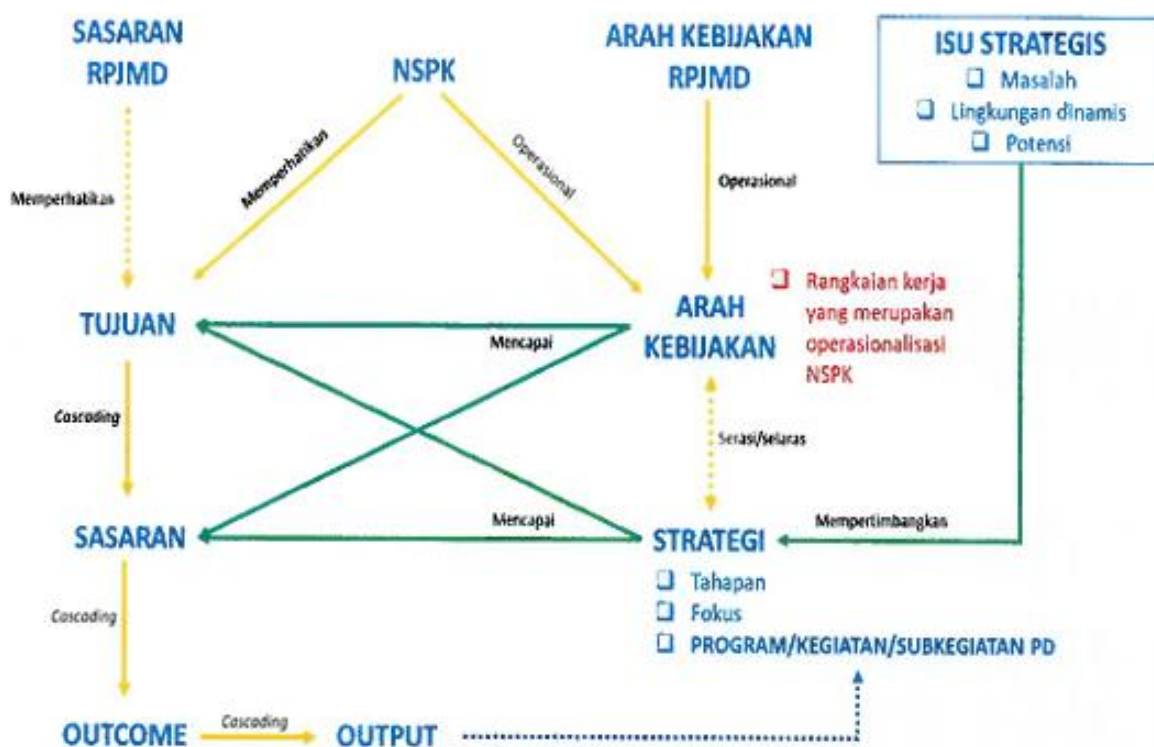
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Pemasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan berpedoman pada nilai religius	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum terbangunnya Infrastruktur yang tangguh, kurangnya Industri Inklusif dan Berkelanjutan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemanasan Global	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah	Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik
	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.				Penguatan Keterbukaan Informasi
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia					Standarisasi pusat data Pemerintah
	Belum optimalnya jaringan keamanan data dan informasi pemerintahan					Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data
	Belum optimalnya kontribusi pengelolaan PAD					Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2025-2029, untuk urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra DPKP 2025-2029. Tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk urusan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton.

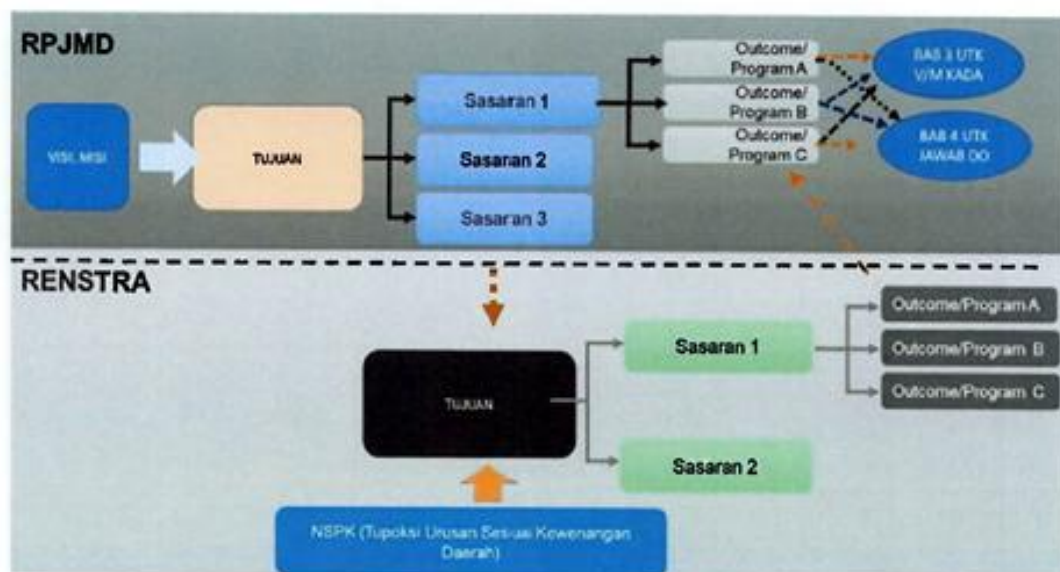
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Pada gambar diatas menggambarkan alur konseptual dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang bersumber dari keterkaitan antara sasaran dan arah kebijakan RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta isu strategis yang relevan dengan kewenangan perangkat daerah.

Konsep ini juga menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah diturunkan secara cascading dari sasaran RPJMD dan ditentukan dengan mempertimbangkan operasionalisasi NSPK serta arah kebijakan RPJMD. NSPK menjadi dasar normatif untuk memastikan setiap tujuan dan sasaran sesuai kewenangan dan standar nasional. Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan isu strategis yang muncul dari masalah, lingkungan dinamis, dan potensi daerah. Proses ini menghasilkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijabarkan secara teknis dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah (Renja PD). Rangkaian logis ini menggambarkan hubungan hierarkis dan siklik yang mengintegrasikan elemen perencanaan strategis secara vertikal dan horizontal, mulai dari visi daerah hingga operasionalisasi di lapangan.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar ini menunjukkan bagaimana keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah dibangun secara sinergis dan konsisten. Visi dan misi daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD, yang kemudian menjadi referensi utama dalam penyusunan Renstra perangkat daerah.

Setiap sasaran dalam RPJMD dihubungkan dengan outcome dari program-program prioritas, yang disalurkan dan dikawal oleh perangkat daerah melalui tujuan dan sasaran Renstra-nya. Di tingkat perangkat daerah, sasaran ditetapkan berdasarkan tupoksi sesuai kewenangan, disertai dengan target outcome yang lebih teknis dan operasional.

Gambar ini juga mengilustrasikan bahwa pelaksanaan program dan capaian outcome menjadi dasar pelaporan pada dua dokumen utama, yaitu BAB III untuk Urusan Pemerintahan Daerah dan BAB IV untuk Kinerja Perangkat Daerah, sebagai bagian dari dokumen evaluatif dan akuntabilitas publik. Dapat dilihat pada tabel 3.4 dan 3.5

3.1.1 Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran dari sasaran daerah sesuai dengan VISI dan Misi sebagai mana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Visi yang hendak dicapai Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 2025-2029 adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN “**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Buton di tahun 2025-2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Buton dijelaskan sebagai berikut :

1. **Religius**, Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ajaran, nilai dan norma-norma luhur dari masing-masing individu pemeluk agama dan kepercayaan untuk menciptakan suasana hubungan yang harmonis dengan sikap saling menghormati dan menghargai.
2. **Sejahtera**, Terpenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan dasar baik lahir atau batin secara adil dan merata. Beberapa indikator ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain indeks pembangunan manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkualitas.
3. **berkelanjutan**, terwujudnya kemampuan Daerah untuk berpikir kedepan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki untuk keberlangsungan kehidupan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang

akan datang untuk menjadi lebih baik.

- 4. Mandiri dan Baerdaya Saing**, suatu keadaan dimana Pemerintah bersama masyarakat mampu mengelola, mendayagunakan dan menjaga potensi yang ada di sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial budaya dengan tidak bergantung dari sumber daya dari luar. Kemampuan beradaptasi dan terbuka pada perubahan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan norma luhur, budaya serta kearifan lokal sehingga tetap mempunyai jati diri sebagai masyarakat Kabupaten Buton. Sikap mandiri ditunjukkan juga dengan kebanggaan Pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan produk dan hasil budidaya lokal yang menjadi ciri khas daerah. Visi ini juga mengandung makna kemampuan daerah (Pemerintah dan Masyarakat) dengan sumberdaya yang dimiliki mampu menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, sosial budaya yang unggul dan mempunyai nilai sehingga dihargai karena memberikan manfaat untuk masyarakat. sehingga keunggulan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) **Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya**, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan tertib, dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai landasan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas budaya daerah.
- 2) **Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan masyarakat**, berfokus pada penguatan dibidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan skses dan mutu pendidikan untuk menciptakan msyarakat yang cerdas dan berdaya saing di bidang kesehatan, misi ini bertujuan utnuk

meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas guna menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Penguatan kesetaraan gender menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor. Selain itu, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan dan sistem sosial yang adaptif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

- 3) **Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, misi ini diwujudkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) berkualitas untuk mendukung aktivitas perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ekosistem lingkungan melalui upaya penurunan risiko bencana dengan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta dampak aktivitas ekonomi.
- 4) **Misi 4 : Meningkatkan ekonomimandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal**, misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dan keunggulan lokal. Kabupaten Buton memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perikanan pariwisata, dan industri pengolahan. Pengembangan potensi dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan memberdayakan seluruh masyarakat Buton melalui peningkatan skill serta memberikan perlindungan pekerja. Hal ini mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton bukan hanya berfokus pada pembangunan yang bersentral untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Buton, namun juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Adapun Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 difokuskan untuk menjabarkan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tujuan utama yang relevan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton adalah ***Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas***. Sedangkan untuk Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang relevan yaitu **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**.

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah **Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informas.**

3.1.2 Sasaran

Dalam rangka mendukung tercapainya visi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton menetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis teknologi
2. Meningkatnya kualitas data statistik

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Base line 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
NSPK : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,35	70,40	70,45	70,50	70,55	70,60	70,65	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis teknologi	Indeks SPBE	2,24	2,6	2,8	3	3,2	3,5	3,7	
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Meningkatnya kualitas data statistic	Indeks Pembangunan statistic	2,62	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3,1	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Infotmatika dan Persandian Kabupaten Buton difokuskan pada:

1. Strategi dari sasaran ***Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis teknologi***
 - Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public
 - Penguatan Keterbukaan Informasi
 - Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data
 - Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD
2. Strategi dari sasaran ***Meningkatnya kualitas data statistik***
 - Standarisasi pusat data Pemerintah

Penahapan Renstra

Penahapan Renstra PD (Perangkat Daerah) adalah pembagian tahapan waktu pelaksanaan Rencana Strategis selama periode 5 tahun (sesuai RPJMD) yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut. Tujuan Penahapan Renstra PD:

1. Mengarahkan langkah kerja tahunan secara lebih fokus dan bertahap.
2. Menentukan prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan kesiapan.
3. Menyinkronkan rencana daerah dengan program nasional dan RPJMD.

Untuk penahapan renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat dilihat padata tabel 3.2 berikut;

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public	Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public	Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public	Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public	Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public
Penguatan Keterbukaan Informasi	Penguatan Keterbukaan Informasi	Penguatan Keterbukaan Informasi	Penguatan Keterbukaan Informasi	Penguatan Keterbukaan Informasi
Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data	Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data	Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data	Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data	Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data

Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD	Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD	Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD	Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD	Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD
Standarisasi pusat data Pemerintah	Standarisasi pusat data Pemerintah	Standarisasi pusat data Pemerintah	Standarisasi pusat data Pemerintah	Standarisasi pusat data Pemerintah

Program Unggulan Kepala Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Digitalisasi Desa	Mempercepat layanan warga desa dengan menghadirkan command center dan sistem pelayanan berbasis digital. Semua ini didukung oleh fasilitas yang memadai, sehingga pelayanan jadi lebih cepat dan mudah.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Ingrated single database	Program Integrated Single Database dibuat untuk menghubungkan data seluruh OPD dalam satu sistem yang terpadu memudahkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Mal Pelayanan Publik	Menghadirkan layanan terpadu berbasis digital dan fasilitas memadai untuk mempermudah akses masyarakat. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan pengelolaan manajemen asset secara terpusat serta peningkatan kesejahteraan ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Kebijakan dari strategi Pengembangan dan Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public
 - Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE
 - Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi
 - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE
 - Meningkatkan integrasi aplikasi layanan
- Kebijakan dari strategi Kebijakan dari strategi Penguatan Keterbukaan Informasi
 - Meningkatkan layanan pengaduan elektronik
 - Meningkatkan keterbukaan badan public
 - Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public
- Kebijakan dari strategi Peningkatan Kualitas keamanan informasi dan data

- Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah
 - Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah
 - Meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah
4. Kebijakan dari strategi Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD
- Meningkatkan pengelolaan dan Kualitas Pelayanan PAD
5. Kebijakan dari strategi Standarisasi pusat data Pemerintah
- Penyusunan daftar data dan metadata statistik sectoral
 - Meningkatkan kualitas data statistik sektoral

Dengan demikian, keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah diatur secara sistematis dan terintegrasi untuk memastikan keselarasan arah pembangunan jangka menengah. Dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan public yang terintegrasi berbasis digital	Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE	
			Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi	
			Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	
			Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE	
			Meningkatkan integrasi aplikasi layanan	
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Meningkatkan layanan pengaduan elektronik	
			Meningkatkan keterbukaan badan public	
			Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public	
	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDMASN, dan pengelolaan aset daerah	Penyusunan daftar data dan metadata statistik sectoral	
			Meningkatkan kualitas data statistik sectoral	
	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber		Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	
			Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	
			Meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah	
	Peraturan Pemerintah (PP)		Meningkatkan pengelolaan dan	

	Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kualitas Pelayanan PAD	
--	--	--	------------------------	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis dan berjenjang dari pernyataan tujuan strategis, sasaran organisasi, hingga capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang dapat diukur. Pendekatan cascading ini menjamin keterkaitan antara rencana strategis jangka menengah dengan implementasi tahunan secara operasional.

Dalam rangka menjamin keselarasan dan keterpaduan perencanaan nasional dan daerah, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur baku yang ditetapkan melalui regulasi nasional, termasuk pemutakhiran nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Rentang waktu perencanaan strategis ini memperhatikan kesinambungan kebijakan dan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang direncanakan hingga tahun 2030 perlu dicantumkan secara eksplisit sebagai bagian dari strategi jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2030.

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

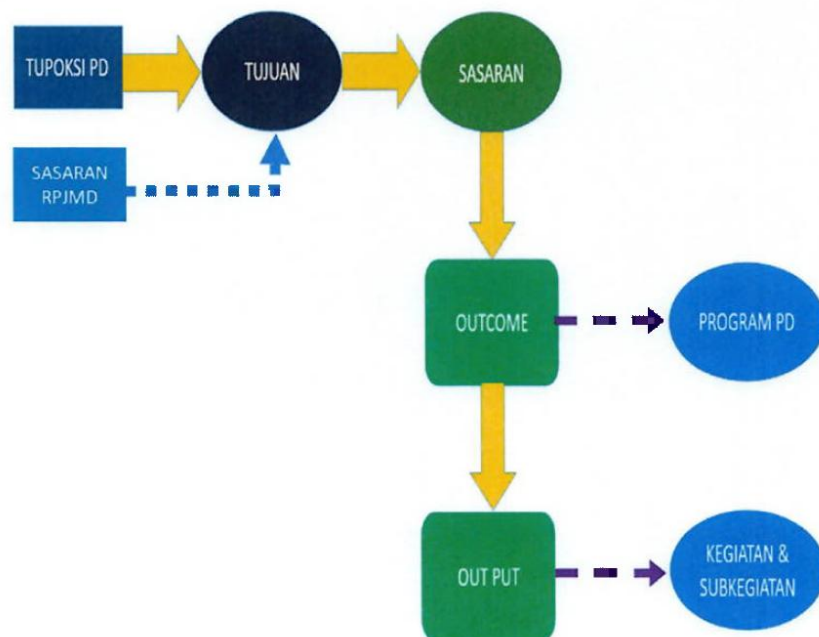
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengarahan semua sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program lima tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya, dimana :

- 2 (Dua) Program urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika:
 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 2. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

- 1 (Satu) Program urusan wajib bidang Statistik:
 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 1 (Satu) Program urusan wajib bidang Persandian :
 1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 1 (Satu) program non urusan yang memiliki 7 Kegiatan yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masing masing program lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai kegiatan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.1 dan 4.2



Gambar di atas menjelaskan alur logis penyusunan perencanaan strategis perangkat daerah dalam dokumen Renstra, yang dimulai dari tugas dan fungsi utama (tupoksi) perangkat daerah hingga kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Tupoksi Perangkat Daerah (PD) merupakan titik awal dalam merumuskan tujuan

dari perangkat daerah. Tujuan ini merupakan pernyataan umum mengenai apa yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan mandat dan kewenangan instansi.

2. Tujuan yang dirumuskan harus mempertimbangkan dan mengacu pada sasaran RPJMD, sehingga tetap terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah secara keseluruhan.
3. Dari tujuan tersebut, dijabarkan lebih lanjut menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
4. Sasaran kemudian diturunkan menjadi outcome, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan program perangkat daerah yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran.
5. Outcome ini selanjutnya dijabarkan dalam output, yaitu keluaran nyata dari kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
6. Program perangkat daerah merupakan penjabaran outcome, sedangkan kegiatan dan subkegiatan merupakan turunan langsung dari output. Program, kegiatan, dan subkegiatan inilah yang akan diimplementasikan melalui anggaran dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Bagan ini menggambarkan hubungan hierarkis dan logis antara perencanaan strategis (tujuan dan sasaran) dengan perencanaan operasional (program dan kegiatan), sehingga menjamin keterpaduan antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah

diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2025 Dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4

Tabel 4.1
Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Satuan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks		
Sasaran RPJMD "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan"		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		
			Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesekretariatan		Cakupan pelayanan kesekretariatan	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Proses penyusunan Dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi sesuai tahapan dan waktu	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan		Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan Perangkat daerah	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

					Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya layanan administrasi umum OPD	Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD OPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya jasa penunjang urusan OPD	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD OPD	Presentasi kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
					Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas Pemerintahan berbasis IT			Indeks SPBE	Indeks		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Presentase tingkat kepuasan terhadap akses dan kualitas Informasi publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	Relasi Media	
					Jumlah Konten Informasi Publik	Komunitas	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti	Laporan	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di	

					bimtek/pelatihan		Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Permohonan	Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi & Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Rekomendasi	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Persentase	Diseminasi Informasi	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Dokumen	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Konten	Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Ketersediaan Layanan Publik Berkualitas dan Berbasis Digital di Kabupaten Buton	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain & Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	Pengelolaan Nama Domain & Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

					Pemerintah Daerah Kab/Kota			
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Laporan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis	

					berdasarkan Analisis Kebutuhan		Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentasi Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kualitas data statistik			Indeks Pembangunan Statistic	Nilai		
			Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Presentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persen	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	Peningkatan kualitas statistik sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100	2.806.899.091	100	2.639.435.842	100	2.739.435.842	100	2.539.435.842	100	2.639.435.842	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan												
2.16.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	35.000.000	100%	25.500.000	100%	29.000.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	
	Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Proses penyusunan Dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi sesuai tahapan dan waktu												
2.16.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000	
2.16.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000	
2.16.01.2. 01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000	
2.16.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.500.000	15 Dok	5.000.000	15 Dok	4.000.000	15 Dok	4.500.000	15 Dok	4.000.000	15 Dok	4.000.000	
2.16.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.500.000	15 Dok	5.000.000	15 Dok	4.000.000	15 Dok	4.500.000	15 Dok	4.000.000	15 Dok	4.000.000	
2.16.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000	
2.16.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000	
2.16.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.432.589.195	100%	2.094.844.231	100%	2.100.344.231	100%	2.099.344.231	100%	2.094.844.231	

	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Tingkat pemenuhan administrasi dan keuangan laporan Perangkat daerah											
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.059.711.000	25 Org	1.389.589.195	30 Org	2.053.844.231	30 Org	2.053.844.231	30 Org	2.053.844.231	30 Org	2.053.844.231
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.507.816	3 Dok	34.000.000	3 Dok	34.000.000	3 Dok	38.500.000	3 Dok	38.500.000	3 Dok	34.000.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.300.000	5 Dok	4.500.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.300.000	5 Dok	4.500.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	4.000.000	5 Dok	3.500.000	5 Dok	3.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	71.000.000	100%	28.000.000	100%	53.000.000	100%	23.000.000	100%	28.000.000
	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat daerah											
2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.000.000	3 Unit	12.000.000	1 Unit	8.000.000	20 Unit	15.000.000	10 Unit	5.000.000	1 Unit	8.000.000
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	50 Paket	35.000.000	20 Paket	8.000.000	35 Paket	25.000.000	10 Paket	5.000.000	20 Paket	8.000.000
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	25 Org	12.000.000	10 Org	6.000.000	10 Org	6.500.000	10 Org	6.500.000	10 Org	6.000.000
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	25 Org	12.000.000	10 Org	6.000.000	10 Org	6.500.000	10 Org	6.500.000	10 Org	6.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	492.840.896	100%	237.350.000	100%	323.600.000	100%	196.091.611	100%	237.350.000
	Terlaksananya layanan administrasi umum OPD	Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran											
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.500.000	1 Paket	4.235.000	1 Peket	3.000.000	1 Peket	3.200.000	1 Peket	3.500.000	1 Peket	3.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65.000.000	1 Paket	70.000.000	2 Paket	25.000.000	2 Paket	30.000.000	1 Paket	25.000.000	2 Paket	25.000.000
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	2.100.000	1 Paket	2.200.000	4 Paket	3.000.000	1 Paket	2.100.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	3.600.000	1 Paket	8.000.000	3 Paket	4.500.000	1 Paket	3.600.000
2.16.01.2.	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	3.000.000	1 Paket	3.630.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	3.000.000	2 Paket	3.250.000	1 Paket	2.850.000

06.0005	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan											
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	11.200.000	5 Dok	15.120.243	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.400.000	2 Dok	3.341.611	1 Dok	2.300.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	47 Lap	380.055.653	30 Lap	197.000.000	38 Lap	270.000.000	60 Lap	152.000.000	30 Lap	197.000.000
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.800.000	2 Dok	4.800.000	1 Dok	1.500.000	2 Dok	4.800.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	401.390.000	100%	175.000.000	100%	141.000.000	100%	100.000.000	100%	175.000.000
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD OPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah											
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	260.000.000			1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	50.000.000
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	125.000.000			2 Unit	75.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	25.000.000	2 Unit	75.000.000
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55.000.000	3 Paket	165.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30.000.000	3 Unit	165.000.000	1 Unit	8.000.000	2 Unit	10.000.000	1 Unit	7.500.000	1 Unit	8.000.000
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27.000.000	4 Unit	32.670.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	7.500.000	1 Unit	6.000.000
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32.000.000	4 Unit	38.720.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	8.000.000	2 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	89.859.000	100%	14.535.177	100%	19.491.611	100%	19.500.000	100%	14.535.177
	Terlaksananya jasa penunjang urusan OPD	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran											
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	75 Lap	2.376.000	100 Lap	3.000.000	120 Lap	3.200.000	120 Lap	3.250.000	100 Lap	3.000.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.000.000	1 Lap	43.560.000	1 Lap	2.500.000	1 Lap	2.750.000	1 Lap	2.750.000	1 Lap	2.500.000
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.500.000	5 Lap	19.965.000	1 Lap	3.000.000	1 Lap	3.150.000	1 Lap	3.500.000	1 Lap	3.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19.800.000	5 Lap	23.958.000	1 Lap	6.035.177	2 Lap	10.391.611	2 Lap	10.000.000	1 Lap	6.035.177
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100%	284.220.000	100%	64.206.434	100%	73.000.000	100%	76.000.000	100%	64.206.434

	Pemerintahan Daerah													
	Terlaksananya pemeliharaan BMD OPD	Presentasi kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik												
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27.000.000	1 Unit	32.670.000	1 Unit	23.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	23.000.000	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55.000.000	2 Unit	66.550.000	2 Unit	21.206.434	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	21.206.434	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.000.000	7 Unit	20.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	5.000.000	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	55.000.000	2 Unit	165.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	17.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	15.000.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			72%	2.444.515.966	72%	1.016.515.021	72%	2.827.313.355	72%	2.838.443.244	72%	3.349.918.702	
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Presentase tingkat kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (Survei)												
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	2.444.515.966	100%	1.016.515.021	100%	2.827.313.355	100%	2.838.443.244	100%	3.349.918.702	
	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi												
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	120.000.000	30 Laporan	1.200.000.000	10 Lap	387.000.000	30 Laporan	1.100.000.000	30 Laporan	1.100.000.000	30 Laporan	1.300.000.000	Proiritas Utama Nasional
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Konten Informasi Publik	25.000.000	30 Komunitas	50.000.000	30 Komunitas	50.000.000	30 Komunitas	250.000.000	30 Komunitas	250.000.000	60 Komunitas	500.000.000	
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	25.000.000	5 Laporan	35.000.000	4 Lap	25.000.000	5 Laporan	75.000.000	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	80.000.000	ASTACITA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	754.000.000	8 Permohonan	315.000.000	5 Permohonan	202.000.000	8 Permohonan	350.000.000	8 Permohonan	350.000.000	8 Permohonan	350.000.000	ASTACITA
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	20.000.000	100%	28.000.000	100%	20.000.000	100%	72.313.355	100%	75.443.244	100%	86.918.702	

2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	25.000.000	30 Rekomendasi	35.515.966	30 Rekomendasi	30.000.000	30 Rekomendasi	60.000.000	30 Rekomendasi	63.000.000	30 Rekomendasi	63.000.000	ASTA CITA
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	40.255.666	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	85.000.000	3 Media	320.000.000	3 Media	150.000.000	3 Media	320.000.000	3 Media	320.000.000	3 Media	320.000.000	ASTA CITA
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	27.000.000	3 Dok	30.000.000	3 Dok	30.000.000	3 Dok	50.000.000	3 Dok	50.000.000	3 Dok	50.000.000	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	25.000.000	15 Konten	175.000.000	8 Konten	55.000.000	15 Konten	200.000.000	15 Konten	200.000.000	15 Konten	200.000.000	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80.000.000	100 Orang	206.000.000	5 Org	37.515.021	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			56%	318.824.500	56%	1.032.934.933	56%	1.713.656.233	56%	1.472.401.588	56%	2.674.301.465	
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Publik Berkualitas dan Berbasis Digital di Kabupaten Buton	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi												
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	51.384.500	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	
	Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	34.522.950	1 Dokumen	51.384.500	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Prioritas
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	267.440.000	100%	982.934.933	100%	1.663.656.233	100%	1.447.401.588	100%	2.624.301.465	
	Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	16.500.000	2 Aplikasi	25.000.000	2 Aplikasi	30.000.000	5 Aplikasi	75.000.000	2 Aplikasi	25.000.000	6 Aplikasi	150.000.000	Prioritas
2.16.03.2.	Koordinasi pelaksanaan	Jumlah Dokumen	42.000.000	1	38.150.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	

02.0019	Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	22.000.000	25 Perangkat Daerah	24.000.000	45 Perangkat Daerah	500.000.000	45 Perangkat Daerah	1.000.000.000	45 Perangkat Daerah	1.000.000.000	45 Perangkat Daerah	1.800.000.000	Prioritas
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	18.700.000	17 Layanan	20.570.000	18 Layanan	30.000.000	18 Layanan	35.000.000	18 Layanan	30.000.000	18 Layanan	50.000.000	Prioritas & ASTA CITA
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	22.000.000	5 Dokumen	18.150.000	6 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	32.000.000	7 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	50.000.000	
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	16.500.000	43 Aplikasi	20.570.000	43 Aplikasi	25.000.000	45 Aplikasi	50.000.000	45 Aplikasi	50.000.000	45 Aplikasi	50.000.000	Prioritas
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	27.500.000	1 Laporan	30.250.000	1 Laporan	35.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	Prioritas
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	27.500.000			2 Aplikasi	60.000.000	2 Aplikasi	60.000.000	1 Aplikasi	32.000.000	2 Aplikasi	60.000.000	ASTA CITA
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	16.500.000	1 Laporan	24.200.000	1 Laporan	25.934.933	2 Laporan	36.656.233	2 Laporan	30.401.588	2 Laporan	39.301.465	
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				25 Perangkat Daerah	112.000.000	38 Perangkat Daerah	150.000.000	15 Perangkat Daerah	75.000.000	45 Perangkat Daerah	200.000.000	Prioritas & ASTA CITA
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	18.700.000	15 Dokumen	24.200.000	15 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	35.000.000	
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	22.000.000	2 Dokumen	18.150.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	35.000.000	ASTA CITA
2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	22.000.000	5 Dokumen	24.200.000	7 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	55.000.000	Prioritas
	URUSAN STATISTIK													

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			62%	192.995.000	62%	600.959.845	62%	1.181.151.814	63%	959.266.995	63%	1.031.120.394	
	Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah												
2.20.02.1 .01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100%	192.995.000	100%	600.959.845	100%	1.181.151.814	100%	959.266.995	100%	1.031.120.394	
	Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Presentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah Provinsi												
2.20.02.1. 01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	38.500.000	100 Persen	46.585.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	375.000.000	100 Persen	278.000.000	100 Persen	300.000.000	
2.20.02.1. 01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	55.000.000	100 Persen	46.585.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	220.000.000	ASTA CITA
2.20.02.1. 01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	27.500.000	100 Persen	66.550.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	ASTA CITA
2.20.02.1. 01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	38.500.000	4 Orang	33.275.000	6 Orang	75.000.000	45 Orang	200.000.000	38 Orang	175.000.000	45 Orang	200.000.000	
2.20.02.1. 01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	53.900.000			100 Persen	20.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	
2.20.02.1. 01.0022	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	27.741.882			2 Laporan	55.959.845	4 Laporan	106.151.814	4 Laporan	106.266.995	4 Laporan	111.120.394	
	URUSAN PERSANDIAN													
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			67%	146.409.927	67%	592.050.919	67%	570.461.104	67%	617.507.214	67%	721.008.657	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah												
2.21.02.2 .01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100%	106.479.927	100%	462.050.920	100%	440.461.104	100%	487.507.214	100%	571.008.657	
	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2.21.02.2. 01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	22.000.000	6 Laporan	26.620.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	128.000.000	18 Laporan	155.000.000	20 Laporan	200.000.000	
2.21.02.2.	Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Laporan	24.200.000	10	29.282.000	20	112.000.000	20	112.000.000	22	120.000.000	25	150.000.000	

01.0006	Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	22.000.000	12 Perangkat Daerah	26.620.000	45 Perangkat Daerah	120.000.000	45 Perangkat Daerah	120.000.000	45 Perangkat Daerah	125.000.000	45 Perangkat Daerah	125.000.000	ASTA CITA
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	19.799.940	5 Dokumen	23.957.927	10 Dokumen	80.050.920	10 Dokumen	80.461.104	11 Dokumen	87.507.214	11 Dokumen	96.008.657	ASTA CITA
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			100%	39.930.000	100%	129.999.999	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	
	Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentasi Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota												
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	33.000.000	7 Kegiatan	39.930.000	15 Kegiatan	129.999.999	15 Kegiatan	130.000.000	15 Kegiatan	130.000.000	15 Kegiatan	150.000.000	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome Prioritas	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Publik Berkualitas dan Berbasis Digital di Kab. Buton	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	Mendukung Kegiatan Prioritas Utama Nasional <i>"Penguatan pers dan media massa bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S)"</i>
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mendukung ASTA CITA
			Pelayanan Informasi Publik	Mendukung ASTA CITA
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Mendukung ASTA CITA
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Mendukung ASTA CITA
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Mendukung Proyek Strategis Digitalisasi Desa
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	• Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database • Mendukung ASTA CITA
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Mendukung ASTA CITA

			Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Penyediaan Akses Internet	• Mendukung Proyek Strategis Mall Pelayanan Publik (MPP) • Mendukung ASTA CITA
			Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Mendukung Proyek Strategis Integrated Single Database
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Mendukung ASTA CITA
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Mendukung ASTA CITA
			Peningkatan kualitas statistik sektoral	Mendukung ASTA CITA
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Mendukung ASTA CITA
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Mendukung ASTA CITA

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIOANL	RUMUS	SATUAN	Baseline 2024	TAGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Kementerian PANRB atau evaluator resmi, mencerminkan tingkat efektivitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja perangkat daerah.	Nilai Review Sakip oleh APIP	Nilai	70,35	70,40	70,45	70,50	70,55	70,60	70,65	
2	Indeks SPBE	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain	Σ (Nilai Indeks Domain x Bobot Domain)	Nilai	2,24	2,6	2,8	3	3,2	3,5	3,7	

		yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE										
3	Indeks Pembangunan Statistuk	Indeks Statistik sectoral adalah ukuran gabungan (komposit) dari capaian institusi pemerintah (KLDI) secara rata-rata dibidang statistik sektoral yang mencakup 5 domain utama yaitu, Prinsip SDI; Kualitas Data; Proses Bisnis Statistik; Kelembagaan; dan Sistem Statistik	Jumlah DSSD terisi / jumlah DSSD	Nilai	2,62	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3,1	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	SATUAN	BASELINE 2024	TAGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Komunikasi dan Informatika											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah perbandingan antara Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo terhadap Jumlah keseluruhan PD. Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- Jumlah OPD (45)	%	17,78		84,44	100	100	100	100	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan	%	24,44	70	75	78	80	83	85	

		masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi										
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kelompok usia masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</i> <i>Jumlah Penduduk (121.720)</i>	%	79,83	81,53	83,22	84,92	86,61	88,31	90	
	Urusan Urusan Statistik											
	Presentasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	Penggunaan data statistic secara sistematis dan terukur oleh perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah</i> <i>Jumlah OPD (45)</i>	%	24,44	74	75	80	82	82	85	
	Presentasi OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Ukuran kuantitatif yang mengindikasikan sejauh mana perangkat daerah menggunakan data statistic untuk menilai kemajuan dan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah.	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah</i> <i>Jumlah OPD (45)</i>	%	24,44	74	75	80	82	82	85	
	Urusan Persandian											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Mengukur tingkat keamanan Informasi dengan mengacu pada indeks KAMI sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Instrumennya adalah (1) Tata kelola keamanan informasi, (2) Pengelolaan resiko keamanan informasi, (3) Kerangka kerja keamanan informasi, (4)Pengelolaan aset informasi, (5) Teknologi dan keamanan informasi	<i>Jumlah nilai perarea keamanan informasi</i> <i>Jumlah area penilaian (645)</i>	%	22,22	20	35	50	60	70	80	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIOANL	RUMUS	SATUAN	Baseline 2024	TAGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE	Σ (Nilai Indeks Domain x Bobot Domain)	Nilai	2,24	2,6	2,8	3	3,2	3,5	3,7	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2025- 2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurung waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selama lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Buton dan Wakil Bupati Buton yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Buton.

Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah dirumuskan secara

konsisten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Bisnis yang religius, sejahtera, mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton.

Pasarwajo, Juni 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Buton,



H. SUHARDIN SANUSI, S.T., M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19750731 200604 1 004